

UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM POLITIK DAN PROSES PEMERINTAHAN DI KEDAH

*Syafhendry¹, Halimah Abdul Manaf², Yosi Novita³, Siswan Ahmad Saputra⁴

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL, Universitas Islam Riau

²Schools of Government, Universiti Utara Malaysia

^{3,4}Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Islam Riau

* Corresponding Author: syafhendry.ip@soc.uir.ac.id

Abstrak

Partisipasi merupakan komponen penting dalam membangkitkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan merupakan hal terpenting dalam pemberdayaan. Mulai menguatnya kesadaran politik yang menyuarakan dilaksanakannya proses demokratisasi dalam praktik pemerintahan di Malaysia perlu mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah Malaysia maupun pemerintah bagian di Kedah serta dari kelompok masyarakat yang ada di Kedah. Namun masih terdapat beberapa persoalan mendasar bagi upaya tumbuhnya proses demokratisasi politik dan pemerintahan di Kedah dan Malaysia pada umumnya. Pemecahan permasalahan ini perlu melibatkan lintas sector, adanya kerja sama yang baik antara pemerintah bagian Kedah, pemerintah Malaysia serta kelompok masyarakat sipil setempat untuk membangun partisipasi masyarakat di dalam proses politik dan pembangunan. Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi. Penting untuk membangun kemitraan yang kuat untuk membangun kultur demokrasi antara pemerintah Kedah, pemerintah Malaysia dan masyarakat sipil. Tujuan dari Kerjasama lintas sector disini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses politik dan pembangunan di Kedah dan Malaysia.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Pemerintah

Abstract

Participation is an important component in generating independence and the empowerment process. Active community participation in every decision-making process is the most important thing in empowerment. Starting to strengthen political awareness which advocates the implementation of the democratic process in government practices in Malaysia needs serious attention, both from the Malaysian government and the state government in Kedah as well as from community groups in Kedah. However, there are still several fundamental problems for efforts to grow the political and governmental democratization process in Kedah and Malaysia in general. Solving this problem requires cross-sector involvement, good cooperation between the Kedah government, the Malaysian government and local civil society groups to build community participation in the political and development process. Increased Cooperation and Collaboration. It is important to build a strong partnership to build a culture of democracy between the Kedah government, the Malaysian government and civil society. The aim of cross-sector collaboration here is to increase community participation to be directly involved in the political and development process in Kedah and Malaysia.

Keywords: Participation, Community, Government

PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan pada keterlibatan dan swadaya gotong-royong masyarakat. Atas dasar itu maka kesadaran, peran serta, dan swadaya masyarakat perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dirasakan sebagai suatu kewajiban Bersama (Umboh, 2004). Makna partisipasi dan peran serta di sini bukan berarti bahwa masyarakat hanya berfungsi untuk memberikan dukungan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan, tetapi juga menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, dapat tercipta *sense of belonging* dan *sense of responsibility* dalam proses pembangunan menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) adalah model partisipasi yang mendukung pembentukan hubungan melalui keterlibatan, kolaborasi, atau pemberdayaan masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka dapat menyumbangkan pengetahuannya dalam perencanaan pembangunan. Konsep pemberdayaan (*empowerment*) dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan.

Partisipasi merupakan komponen penting dalam membangkitkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan merupakan hal terpenting dalam pemberdayaan. Green dan Brock (2005) mengemukakan secara sederhana bahwa partisipasi mengandung makna keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan untuk mencapai sesuatu yang secara sadar diinginkan oleh pihak yang berkepentingan tersebut. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki makna (*meaningful participation*) apabila menyangkut keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sayangnya, masyarakat memiliki keterbatasan untuk ikut aktif dalam perencanaan pembangunan dimana hal ini tidak mendorong mereka untuk aktif dalam berpartisipasi. Keterbatasan tersebut disebabkan karena dua hal yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal karena pendekatan *bottom-up* yang diterapkan pemerintah bersifat seremonial dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga keterlibatan masyarakat secara keseluruhan sangat kurang. Sementara, faktor internal adalah keterbatasan dalam diri masyarakat itu sendiri dimana mereka tidak mampu menyampaikan gagasan dengan baik, seperti usulan pembangunan yang tidak layak.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakat. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.

Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Keterlibatan masyarakat luas, merupakan salah satu kunci yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat ke dalam proses pembangunan, maka pemerintah tidak lagi menerapkan sistem pembangunan yang *Top Down* namun akan menerapkan sistem *Bottom Up* dimana usulan yang berasal dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan daerah. Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa dengan kata lain partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan. Partisipasi sepadan dengan arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu: 1) partisipasi politik *Political Participation*, 2) partisipasi sosial *Social Participation* dan 3) partisipasi warga *Citizen Participation/Citizenship*, ke tiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Partisipasi Politik, political participation lebih berorientasi pada "mempengaruhi" dan "mendudukan wakil-wakil rakyat" dalam Lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan sendiri.
- b. Partisipasi Sosial, social Participation partisipasi ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai beneficiary ataupun di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi.
- c. Partisipasi Warga, citizen participation/citizenship menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai : Suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik".

Beberapa arti Perencanaan adalah sebuah konsep yang terencana dan disusun secara sistematis oleh suatu badan tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Perencanaan adalah pemilihan dan penetapan kegiatan, selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan dan haruslah diimplementasikan.

Pembangunan adalah perubahan kearah kondisi yang lebih melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan adalah pembaharuan yang juga merupakan suatu bentuk perubahan ke arah yang dikehendaki tetapi lebih terkait dengan nilai-nilai atau sistem nilai.

Dengan melihat kedua pengertian di atas maka dapat kita simpulkan bahwa Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fokus kegiatan pengabdian yang umum dilakukan meliputi: Pemberdayaan Masyarakat: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik serta keterlibatan dalam perencanaan proses pembangunan. Disini diperlukan kesadaran dari kelompok masyarakat sipil bahwa mereka adalah bagian penting dari proses pemerintahan, dimana masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan tidak hanya sebatas objek dari pembangunan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang dapat digunakan dalam bidang produksi untuk pemberdayaan masyarakat:

- a. Pelatihan dan Pembinaan: Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan kepada kelompok masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Metode ini dapat meliputi pelatihan praktis, simulasi, atau pembinaan langsung oleh ahli atau praktisi di bidang politik pemerintahan.
- b. Transfer skill penguatan demokrasi Teknologi: Melakukan transfer skill kepada kelompok masyarakat untuk meningkatkan kecakapan dalam membangun masyarakat sipil yang kuat yang dapat mewarnai dan mengontrol jalannya proses pemerintahan
- c. Pendampingan dan Konsultasi: Memberikan pendampingan dan konsultasi kepada kelompok masyarakat sipil di Kedah untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Malaysia sedang mengalami peningkatan partisipasi politik, khususnya pada Pemilu 2013 dan 2018. Peningkatan partisipasi signifikan terjadi pada kelompok yang menginginkan perubahan sistem politik Malaysia. Diinisiasi dan dikelola oleh Gabungan Pilihanraya Bersih dan Adil (Bersih), kelompok reformis Malaysia menginginkan sejumlah agenda perbaikan politik Negeri Jiran. Selain menginginkan kemandirian komisi pemilihan umum yang lepas dari Kementerian Dalam Negeri, Bersih pun ingin pergantian sistem pemilu demokrasi belumlah wujud di negara tersebut. Meski begitu, dorongan ke arah demokratisasi telah berlangsung. proses

demokratisasi di Malaysia berhasil dilaksanakan dalam kadar tertentu hasil dari peran yang dimainkan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil. Peran masyarakat sipil tersebut diantaranya meliputi perantara, pendorong, pembela, oposisional dan penyokong dalam konteks hubungan antara pemerintah dengan rakyat

Sebagai negara yang baru bergerak ke arah tumbuhnya demokratisasi, kelompok sipil masyarakat Kedah mempunyai tantangan tersendiri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan di wilayah Kedah dan Malaysia pada umumnya. perkembangan politik Malaysia di bawah pemerintahan Dr. Mahathir telah berhasil membawa perubahan dan pembangunan ekonomi yang pesat bagi Malaysia karena kemampuannya untuk menjaga stabilitas politik. Mahathir berhasil membawa Malaysia keluar dari bayang-bayang konflik politik antar etnik yang terjadi pada Mei 1969. Dimana konflik antar etnik ini terjadi akibat kekalahan Partai Perikatan (yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC) pada pemilihan umum tahun 1969.

Dari beberapa kajian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan tersebut. Pertama, konspirasi politik yang dimainkan oleh Partai Komunis Malaya (PKM) untuk merampas kekuasaan dari pemerintah berkuasa. Dalam konteks ini PKM menggerakkan pemuda Cina untuk menantang ketuanan Melayu setelah pemilihan umum tahun 1969 yang akhirnya dilawan oleh etnik Melayu dan berakhir dengan pertumpahan darah. Kedua, kerusuhan terjadi sebagai bentuk protes atas ketimpangan sosioekonomi antara etnik Melayu dan Cina yang menyebabkan kecemburuan sosial. Bukan hanya kecemburuan yang memicu pecahnya tragedi, tetapi perilaku etnik Cina yang mulai mempermasalahkan ketuanan dan keistimewaan orang Melayu. Ketiga, dinyatakan bahwa tragedi tersebut sebagai upaya perebutan kuasa yang dilakukan oleh para pemimpin sakit hati dalam UMNO terhadap kepemimpinan yang berkuasa.

Ada dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di Kedah dan Malaysia pada umumnya, Pertama : Pemerintah di tuntut untuk lebih aspiratif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Kedua : pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan.

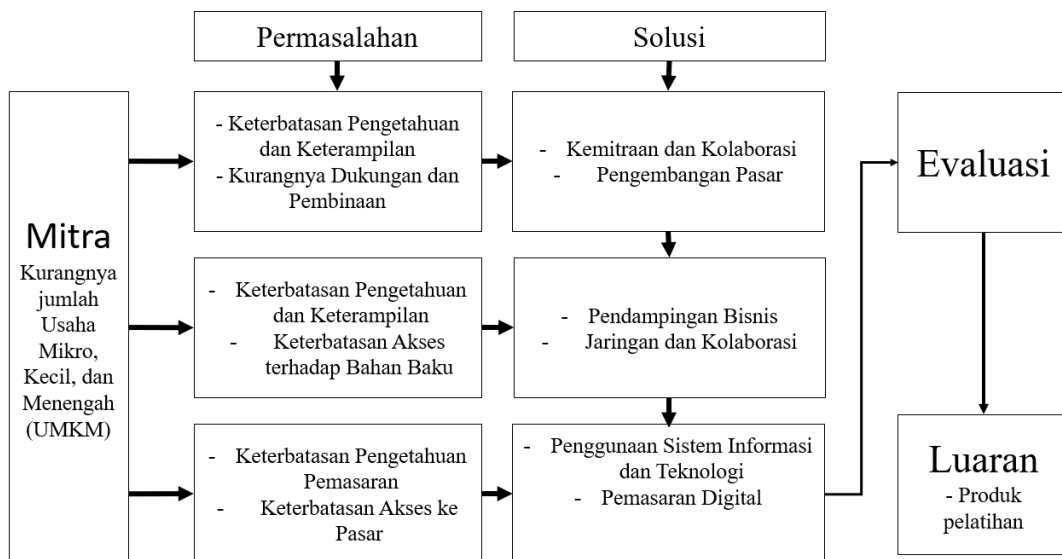
Perencanaan pembangunan daerah merupakan pekerjaan yang sangat penting, karena dengan perencanaan kita bisa membaca dan merencanakan mau dibawa kemana arah pembangunan daerah kedepannya, dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sistem Perencanaan Pembangunan harus mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga akan mendefinisikan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Jadi Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam proses Menyusun perencanaan tentunya dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji indikator-indikator perkembangan di daerah diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan beberapa indikator lainnya terutama kondisi keuangan daerah.

Perencanaan pembangunan di Kedah tentu harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan Malaysia, karena capaian tujuan pembangunan harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam system pemerintahan modern yang mengacu pada model

praktik demokratisasi yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif aktif dari masyarakat. Dengan adanya program-program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program tersebut.

Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang.



IPEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni) Pengabdian Masyarakat merupakan konsep yang mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, teknologi, dan seni untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pengabdian Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini dilakukan melalui penerapan pengetahuan dan teknologi yang relevan serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengembangan dan implementasi solusi.



gambar.1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

SIMPULAN

Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan merupakan hal terpenting dalam pemberdayaan. Mulai menguatnya kesadaran politik yang menyuarakan dilaksanakannya proses demokratisasi dalam praktik pemerintahan di Malaysia perlu mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah Malaysia maupun pemerintah bagian di Kedah serta dari kelompok masyarakat yang ada di Kedah. Namun masih terdapat beberapa persoalan mendasar bagi upaya tumbuhnya proses demokratisasi politik dan pemerintahan di Kedah dan Malaysia pada umumnya. Pemecahan permasalahan ini perlu melibatkan lintas sector, adanya kerja sama yang baik antara pemerintah bagian Kedah, pemerintah Malaysia serta kelompok masyarakat sipil setempat untuk membangun partisipasi masyarakat di dalam proses politik dan pembangunan. Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi. Penting untuk membangun kemitraan yang kuat untuk membangun cultur demokrasi antara pemerintah Kedah, pemerintah Malaysia dan masyarakat sipil. Tujuan dari Kerjasama lintas sector disini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses politik dan pembangunan di Kedah dan Malaysia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan limpahan karunia kegiatan Pengabdian Intenational ini dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terimakasih kepada mitra Universitas Utara Malaysia (UUM) di Kedah Malaysia yang telah dapat bekerjasama dengan Universitas Islam Riau dalam program Pengabdian International. Dan terimakasih kepada seluruh tim yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian International, tanpa adanya bantuan dan dedikasi yang telah diberikan mungkin kegiatan ini tidak berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Jasin, 2009, *Komedi & tragedy: politik mutakhir Malaysia*, Kuala Lumpur: Berita Publihing
- Brown, G.K, 2004, *Civil society and social movements in ah ethnically divided society: the case of Malaysia, 1981-2001*. Tesis PhD. University of Nottingham.

Case, W, 2004, Testing Malaysia's pseudo-de-mocracy. Dlm. Edmund Terence Gomez (pnyt.). The state of Malaysia: ethnicity, equity and reform, 29-48, London: Routledge Curzon.

Zulkifli Sulong, 2009, Politik abad ke-2: perubahan ataupun harapan palsu, Petaling Jaya: The Malaysian Insider.

Mujahid Yusof, 2009, Wajah baru politik Malaysia, Petaling Jaya: Anbakri Publika.

